

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Partai Politik

1.1 Pengertian Partai Politik

Partai Politik ialah suatu perkumpulan orang yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya kelompok ini memperoleh kekuasaan Politik dan merebut kedudukan politik dengan cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijakan dan kebijaksanaan yang mereka miliki¹.

Kemudian dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa Partai Politik adalah Organisasi bersifat Nasional dan dibentuk. Oleh sekumpulan warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik negara, masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

¹ Miriam Budiarjo Op cit Hlm. 160-161

Partai politik menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

Menurut R.H. Soltau mendefinisikan partai politik adalah sekelompok warga yang terorganisir, yang bertindak sebagai unit politik dengan menggunakan hak suara mereka, bertujuan untuk mengontrol pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

Robert K. Carr menyatakan partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah.

Joseph Schumpeter menyatakan bahwa partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktik yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan.

Menurut La Palombara dan Anderson, partai politik adalah setiap kelompok politik, yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat

pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum (baik bebas maupun tidak bebas).

Partai politik memiliki suatu konsep yang menurut Frank J. Sorauf meliputi;

- a. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum,
- b. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif),
- c. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya,
- d. Menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai suatu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.

Partai politik memiliki tiga prinsip dasar, menurut Hafied Cangara dalam Labolo dan Ilham, tiga prinsip dasar partai politik adalah sebagai berikut;

- a. Partai sebagai koalisi

Yakni membentuk koalisi berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibentuk atas dasar koalisi di dalamnya terdapat faksi-faksi. Misal didalam tubuh partai Golkar terdapat faksi Kosgoro, MKGR, dan Korpri (sebelum tahun 1999). Demikian pula dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat faksi NU, Permusi, Perti, dan PSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar sering mengganggu kesatuan partai karena satu sama lain berusaha menjadi dominan dalam partai. Ketidakcocokan

dalam partai terutama muncul dalam penetapan asas perjuangan, program, kepengurusan organisasi, dan pencalonan kandidat.

b. Partai sebagai organisasi

Untuk menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis, dan berkelanjutan partai politik harus dikelola. Partai harus dibina dan dibersarkan sehingga mampu menarik dan menjadi wadah perjuangan, sekaligus representasi dari sejumlah orang atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilu dengan label partai, mengambil bagian dalam partai pemilu, mengajukan calon yang disepakati, mengumpulkan dana, dan membuat isu propaganda dalam kampanye. Untuk itu, partai politik melakukan mobilisasi kepada anggota-anggotanya untuk loyal kepada calon.

c. Partai sebagai pembuat kebijakan. Partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial lainnya dalam hal pengambilan kebijakan. Partai politik mendukung secara konkret para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Dari posisi ini mereka memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengangkat petugas atau karyawan dalam lingkup kekuasaannya, bahkan turut memberi pengaruh dalam pengambilan kebijakan di kementerian dimana kader partai menduduki posisi yang sama melalui kolegitas partai.²

² Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm. 13-15

Berdasarkan penuturan para ahli, maka dapat dikatakan bahwa partai politik adalah kumpulan dari masyarakat yang menjalankan kegiatan politik untuk mengontrol pemerintah melalui pemilihan umum, dengan pelaksanaan kegiatan organisasi yang tertata dan terorganisasi dengan jelas sesuai peraturan.

1.2 Fungsi Partai Politik

Fungsi utama dari partai politik adalah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut adalah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya adalah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif atau eksekutif)³

Firmanzah dalam Lambolo dan Ilham⁶ menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai

³ Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm. 15.

politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab, konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Fungsi partai politik secara singkat disampaikan oleh Miriam Budiardjo dalam Lambolo dan Ilham⁴ yaitu;

- a. Sarana komunikasi politik
- b. Sarana sosialisasi politik
- c. Rekrutmen politik
- d. Pengatur konflik

Sedangkan menurut Almond dan Powell (dalam Lambolo dan Ilham), partai politik memiliki tiga fungsi, yaitu;

- a. Rekrutmen politik
- b. Sosialisasi politik
- c. Artikulasi dan agresi kepentingan

Sementara Fungsi Partai Politik menurut Rahman adalah partai politik memiliki peranan dalam mengontrol para kadernya dimasyarakat/ Partai Politik mendekati diri dengan masyarakat, berikut beberapa fungsi Partai Politik menurut ahli⁵:

1. Fungsi Sosialisasi Politik

⁴ Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm. 16.

⁵ A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 102-103

Sosialisasi politik adalah bagaimana partai politik memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat tentang sikap dan orientasi politik mereka.

Secara harfiah, sosialisasi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Sedangkan sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat.

Sosialisasi politik digunakan partai politik untuk menyebarkan dan menanamkan ideologi politiknya kepada masyarakat. Proses sosialisasi tersebut dilaksanakan baik secara sengaja dengan cara formal ataupun non-formal, maupun dengan cara yang tidak disengaja yaitu melalui hubungan bermasyarakat sehari-hari.

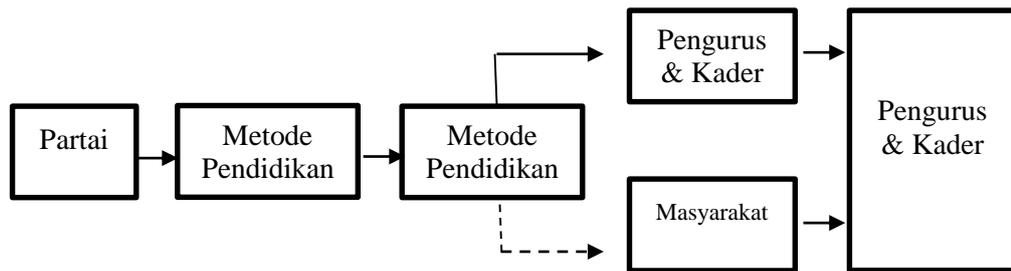
Dalam sosialisasi politik terdapat dua metode penyampaian pesan, yaitu:

a. Melalui pendidikan politik

Pendidikan politik adalah suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat, mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik melalui media beripa sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan seminar serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat, bersaing secara sehat, dan mendidik

masyarakat untuk mematuhi aturan. Objek dari pendidikan politik tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengurus dan kader, serta kelompok masyarakat.

Gambar 2.1
Pendidikan Politik Oleh Partai



Sumber: Lambolo & Ilham, 2017: 21

Partai politik wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada pengurus dan kader partai serta masyarakat.

1) Materi pendidikan

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada kader dan pengurus partai lebih berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan program partai, peningkatan loyalitas dan dedikasi kader, peningkatan kualitas kemampuan kader untuk dapat berpikir futuristik.

Materi yang disampaikan dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat meliputi posisi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan konstitusi negara.

2) Metode pendidikan

Atas dasar penjabaran materi pendidikan, diketahui bahwa materi pendidikan politik yang disampaikan kepada kader dan pengurus partai maupun masyarakat berbeda. Hal ini metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tersebut juga berbeda.

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada kader dan pengurus partai adalah penyampaian yang intensif secara langsung untuk membentuk pikiran mereka agar memiliki loyalitas dan integritas kepada partainya.

Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada masyarakat dapat berupa penyampaian secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada praktiknya, penyampaian materi lebih sering dilakukan secara tidak langsung, misalnya dengan menggunakan media massa sebagai perantara.

3) Tujuan pendidikan

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik bagi kader dan pengurus partai adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa, memberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, hak, dan kewajiban partai politik, serta untuk meningkatkan kapasitas kader dan pengurus partai.

Tujuan partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Harapan terselenggaranya pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dari kader dan pengurus serta masyarakat.

- b. Melalui indoktrinasi politik
- c. Indoktrinasi politik merupakan suatu proses yang hanya dilakukan hanya oleh pihak penguasa untuk menanamkan nilai, norma, dan simbol yang dianggap baik oleh pihak penguasa tersebut kepada masyarakat.

Biasanya indoktrinasi politik ini dilakukan oleh sistem politik totaliter yang dilakukan oleh berbagai forum pengarah yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin.⁶

2. Fungsi Partisipasi Politik

Fungsi Partai politik sebagai Partisipasi adalah Partai Politik menjadi suatu wadah bagi anggota dan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginannya berperan aktif dalam kegiatan politik. Contohnya ikut serta dalam proses pembentukan pemimpin pemerintahan melalui

⁶ Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm. 21-23.

pemilu dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pembuatan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah.

3. Fungsi rekrutmen politik

Fungsi rekrutmen politik adalah Partai Politik membuka kesempatan bagi siapa saja masyarakat untuk bergabung dengan partai melaksanakan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk mensejahterakan dan menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara.

Proses rekrutmen merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan latihan. (Gabriel Almond dalam Lambolo dan Ilham)⁷.

Proses rekrutmen akan memiliki dampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Aktivis partai dianggap sebagai unsur terpenting, dengan aktivis yang unggul maka roda organisasi partai akan berjalan dengan sangat baik.

⁷ Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm. 10.

Pola rekrutmen memiliki dua proses menurut Seligman⁸, yaitu yang pertama, perubahan dari peranan non-politik menjadi peranan politik yang berpengaruh. Kedua, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Dengan demikian, berdasar atas keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pola rekrutmen ada dua hal, yang pertama adalah perekrutan yang dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki latar belakang politik menjadi anggota partai yang berkaitan dengan politik, kemudian yang kedua adalah pola rekrutmen yang telah memilih dan menyeleksi anggota untuk dijadikan pengurus partai dan menduduki suatu jabatan tertentu di dalam partai.

Kaitan dasar adanya pola rekrutmen politik diklasifikasikan oleh Barbara Geddes ke dalam empat model sebagai berikut⁹;

a. *Partisanship*

Partisanship yaitu rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas dasar loyalitas pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang memperhatikan kompetensi.

b. *Meritocratic*

Meritocratic yaitu rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain-lain.

c. *Compartmentalization*

⁸ Ibid.... Hlm. 18

⁹ Ibid.... Hlm. 18-19

Compartmentalization yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informasi bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal.

d. *Survival*

Survival yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.

Proses rekrutmen secara umum menurut Lili Romli (dalam Lambolo dan Ilham) dibedakan menjadi 2 sifat, yaitu:

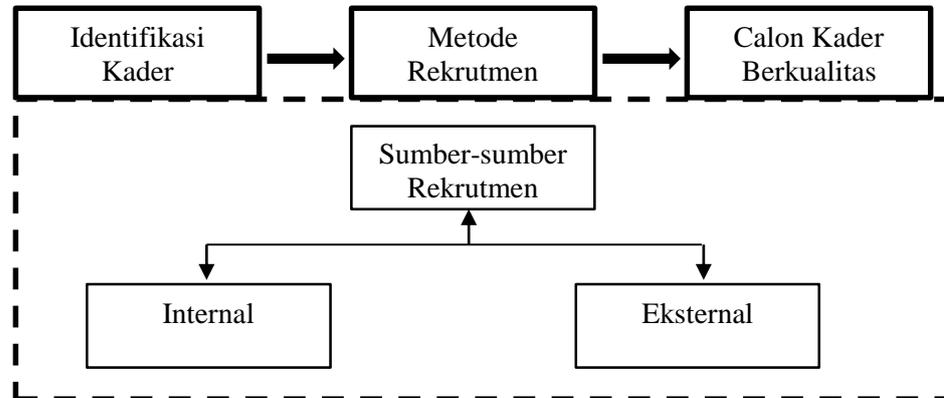
a. Sistem rekrutmen politik terbuka

Sistem rekrutmen terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan

b. Sistem rekrutmen politik tertutup

Sebaliknya, sistem rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab, pengusaha, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, bahkan keluarga dari pihak-pihak yang berkuasa.

Gambar 2.2
Metode Rekrutmen dan Seleksi Pemimpin



Sumber: Labolo dan Ilham, 2017;20

4. Komunikasi politik

Komunikasi politik mengandung arti;

- a. Pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami; hubungan; kontak; perhubungan.
- b. Sedangkan jika dihubungkan dengan politik, komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

Berdasarkan dua keterangan tersebut maka, partai politik memiliki fungsi sebagai perantara pemberi informasi antara ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah dan kinerja pemerintah terhadap masyarakat.

Gambar 2.3
Proses Komunikasi Politik



Sumber: Lambolo & Ilham, 2017:23

Inti dari gambar yang disampaikan bahwa, partai politik menjalankan dua peran dalam menjalankan fungsinya, yaitu sebagai pemberi pesan kepada pemerintah dan kepada masyarakat atau komunikator, dan juga sebagai komunikan, yang memiliki fungsi sebagai diberi pesan oleh masyarakat dan pemerintah terkait regulasi, keputusan-keputusan yang bersifat menyangkut orang banyak. Posisi partai politik menjadikannya sangat penting diantara pemerintah dan masyarakat.

5. Fungsi pengendali konflik

Timbulnya suatu konflik bagi negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi merupakan sesuatu yang harus terjadi. Hal ini disebabkan karena semakin majemuknya masyarakat dan meningkatnya daya kritis dari setiap individu untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Konflik yang berasal dari tuntutan masyarakat tersebut apabila tidak dikendalikan dan diakomodasi dengan benar maka akan menimbulkan kisruh yang mengarah pada aksi-aksi fisik antarindividu atau kelompok. Pada sistem politik di negara yang demokratis, pengendalian konflik tersebut merupakan fungsi dari partai politik.

Konflik bukan merupakan suatu halangan dalam mencapai suatu tujuan akan tetapi hendaknya konflik dipahami sebagai jalan untuk mencapai kebaikan bersama. Kebaikan bersama akan tercapai apabila partai politik mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui cara-cara yang dialogis. Cara-cara dialogis yang dimaksud adalah dengan menerima dan mengumpulkan berbagai aspirasi dan kepentingan pelaku

konflik lalu membahasnya dalam musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil dari musyawarah tersebut adalah solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik dengan keuntungan di berbagai pihak. Agar didapatkan solusi yang terbaik, para wakil rakyat dari masing-masing partai harus mau berkompromi dan meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai.¹⁰

6. Fungsi kontrol terhadap pemerintah

Kontrol terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk kontrol politik yang dilakukan oleh partai politik untuk memastikan bahwa kebijakan ataupun pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan semestinya.

Ketika partai politik menemukan adanya suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, maka terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan oleh partai politik tersebut dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemerintah¹¹:

a. Melalui parlemen

Sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik yang sedang duduk di lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Lembaga legislatif ini memiliki beberapa fungsi, bisa sebagai rekan pemerintah dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal

¹⁰ Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm. 24.

¹¹ Firmanzah. 2007. *Marketing Politik*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia). Hlm. 76

ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan mengingat pola pengambilan keputusan yang cukup kompleks dan kerap terjadi negosiasi antarfraksi.

b. Melalui non-parlemen

Partai politik dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisasinya melalui jalur non-parlementer. Misalnya dengan melakukan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Selain itu, bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik.

1.3 Klasifikasi Partai Politik

Ditinjau dari segi fungsi dan keanggotaannya, Partai Politik dibedakan menjadi 3 macam yaitu Partai berbasis Massa/Lindungan, Partai berbasis Kader dan Partai *Catch-All*¹².

a. Partai Massa

Partai massa atau lindungan adalah partai yang mengutamakan dan mengandalkan pada jumlah anggotanya. Partai jenis ini biasanya beranggotakan orang “ kelas Bawah” yang massanya sangat banyak. Maka dengan mudah memobilisasi massa dengan sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok di masyarakat agar elektabilitas partai pada pemilu dapat meningkat. Banyaknya

¹² Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *OP. Cit.* Hlm. 28-30

basis massa partai jenis ini disebabkan karena partai ini merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat berada dalam lindungan sebuah partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program pada umumnya yang bersifat umum.

Meskipun terdiri dari elemen-elemen yang tidak sedikit, partai jenis ini memiliki kelemahan, yaitu;

- 1) Longgarnya keterikatan antaranggota karena banyaknya aliran politik yang ada menyebabkan ikatan ideologis dalam partai menjadi lemah,
- 2) Alotnya proses pembagian kursi (jabatan) dan perumusan kebijakan karena karakter dan kepentingan setiap kelompok akan sangat menonjol. Ketidakmampuan partai dalam membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak merupakan ancaman bagi keutuhan partai.

b. Partai Kader

Partai berbasis Kader adalah partai yang fokus pada pembentukan disiplin dan loyalitas anggotanya sehingga tercipta partai yang solid. Partai ini mengasumsikan bahwa dengan jumlah yang sedikit maka tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dapat dicapai. Proses pembentukan loyalitas dan disiplin yang tinggi tersebut tercermin dari proses pembentukan anggota yang sangat ketat dan berjenjang. Selain itu,

penegakkan disiplin kepada anggota-anggotanya konsisten tanpa pandang bulu. Biasanya partai kader ini disebut sebagai partai asas atau ideologi.

Karakteristik partai ini menurut Wolinetz adalah:

- 1) Kepemimpinan kelompok profesional dengan tingkat akomodasi tinggi dalam strata partai lebih rendah
- 2) Anggota lebih rendah
- 3) Orientasi yang kuat dan luas terhadap pemilih
- 4) Memelihara struktur untuk menjamin tingkat keyakinan dari demokrasi internal
- 5) Kepercayaan sumber keuangan diatas kedua kombinasi dari subsidi publik dan pendapatan serta donasi anggota.

Kekurangan dari sistem ini adalah kurangnya dukungan dari suara rakyat kelas bawah. Sedangkan keuntungannya yaitu lebih efisiennya kerja partai, dinamis, dan biasanya dalam pengangkatan jabatan politik sering diperhitungkan oleh partai yang berkuasa pemenang pemilu untuk merekrut tokoh-tokoh yang profesional dalam bidangnya dari anggota-anggotanya¹³.

c. Partai *Catch all*

Partai *Catch All* adalah partai yang menggabungkan antara jumlah massa yang banyak dan kaderisasi partai yang berjenjang. Partai jenis ini menyatakan bahwa partainya

¹³ Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *OP. Cit.* Hlm. 29-30

mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Orientasi dari partai ini adalah semata-mata untuk memenangkan pemilu. Oleh karena itu, isu yang disampaikan ketika kampanye kerap kali berubah-ubah bergantung kepada isu yang sedang populer dikalangan pemilih.

Partai di Indonesia lebih sering menonjolkan ciri sebagai partai *Catch All* karena kenyataannya di Indonesia tidak ada partai yang benar-benar menampilkan ciri dari partai massa atau partai kader tetapi perpaduan dari kedua jenis partai tersebut.

2. Kaderisasi Partai Politik

Kader adalah orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak dan atau membantu tugas dan fungsi pokok organisasi tersebut. Kaderisasi merupakan usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi yang biasanya mengikuti suatu silabus tertentu. Kader diambil dari istilah yang diperkenalkan Lenin pada masa pembentukan Partai Komunis Soviet.

Sebenarnya ada perbedaan antara pengertian kader dan anggota partai politik, seorang kader sudah pasti anggota partai, sedang anggota belum tentu jadi kader partai. Meski untuk menjadi kader partai harus terlebih dahulu menjadi anggota partai yang keanggotaannya berdasarkan prinsip sukarela. Setiap partai mempunyai cara tersendiri untuk mengatur keanggotaannya, demikian pula dalam membentuk kader partai sebagai kekuatan inti suatu organisasi politik. Secara formal, yang

disebut dalam sistem kepartaian adalah anggota, karena memang pengertian kader adalah anggota yang secara khusus dibina dan dibentuk menjadi personil inti organisasi partai.

Kader pada dasarnya adalah anggota yang terseleksi, berdasarkan pengujian, penilaian dan pertimbangan tertentu hasil dari pengamatan keaktifan, kesetiaan, keterampilan, kepandaian, moral dan mentalitas, dedikasi dan sebagainya, baik selama mengikuti kegiatan-kegiatan partai maupun kiprah oprasional penugasan di lembaga-lembaga eksternal partai, sedangkan anggota mencakup semua orang yang terdaftar menjadi anggota partai, termasuk mereka yang tidak pernah aktif sama sekali, namun namanya tercantum dalam daftar.

Pengertian kader menurut Bambang Yudhoyono adalah sebagai berikut:

1. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas.
2. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada dibawah control organisasi.
3. Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik.

Pada dasarnya kader partai adalah anggota suatu partai yang dibentuk menjalankan fungsi organisasi politik dan disiapkan untuk menjaga eksistensi dan regenerasi partai politik. Pembentukan seseorang menjadi kader, dimulai sejak pelatihan dan pendidikan sebagai kader yang diikuti dengan penugasan seseorang anggota yang telah menunjukkan kinerja politik yang harus dikembangkan dalam

proses edukasi berjenjang. Sama saja dengan birokrasi pemerintahan, setiap PNS harus dikenalkan dengan organisasi pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Mereka pun dididik dengan berbagai ilmu pemerintahan, dikenalkan dengan aturan untuk membentuk kesatuan aturan nilai sebagai abdi Negara. Tentu saja, konteks edukasi dalam partai politik akan sangat berbeda dengan pemerintahan atau para profesional.

Kekhususan partai politik adalah kemampuan dan kapasitas dirinya dalam advokasi kepentingan rakyat dan pengambilan keputusan kenegaraan. Tentu saja, hal tersebut tidak dengan sendirinya setiap anggota bisa menjadi kader partai, begitu juga tidak semestinya seseorang dengan tiba-tiba menjadi politisi handal.

Kaderisasi lebih bersifat sebagai proses “intervensi” dari partai politik untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjalankan sebagai fungsi partai. Selain itu, secara eksternal, kaderisasi juga berarti penting bagi tanggung jawab partai dalam melakukan pendidikan politik kepada publik. Kaderisasi sekaligus juga berguna untuk memastikan bahwa orang-orang yang terseleksi dalam proses rekrutmen adalah orang yang kompeten atau memiliki loyalitas terhadap partai. Karakteristik kaderisasi yang ingin dihasilkan ini akan juga ditentukan oleh kecenderungan tipologi partai yang bersangkutan¹⁴.

Proses kaderisasi ini dapat terjaga *kontinuitas*-nya, maka dibutuhkan Pelembagaan kaderisasi. Ada dua dimensi utama yang penting dicermati dalam rangka melakukan pelembagaan kaderisasi, yang sebenarnya menjadi ciri khas

¹⁴ Ridho Ferdian., *Model Kaderisasi Partai Politik Melalui Sayap Partai di Bidang Kepemudaan.* (Skripsi). Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2019. (online diakses tanggal 01 mei 2020) hlm. 20-21.

pelembagaan demokrasi dalam internal partai, yakni dimensi Formal dan dimensi Politis. Dimensi Formal berkenaan dengan soal bahwa internalisasi nilai-nilai demokrasi dan perjuangan partai butuh dicangkokkan melalui instrumen program pendidikan dan pembentukan lembaga yang khusus mengelola kaderisasi. Dengan kata lain ini berkenaan dengan pembentukan sistem formal kaderisasi. Sedangkan dimensi politis menempatkan kaderisasi dalam makna ruang politik, yakni ruang tarik-menarik atau kompetisi berbagai kepentingan atau faksi-faksi internal partai yang rawan konflik. Secara spesifik, benturan antara dimensi formal dan politis ini akan diawali dari ketegangan kebutuhan partai untuk menciptakan standar-standar kapasitas tertentu bagi para anggotanya di satu sisi, dan potensi kehendak politis untuk mengabaikannya. Dimensi politis yang muncul di sini sebenarnya juga karena keterkaitan kaderisasi dengan dimensi politis dalam proses rekrutmen.

Komitmen untuk melaksanakan kaderisasi tidak cukup dengan hanya mencantulkannya dalam AD/ART. Ini berikutnya harus diterjemahkan dalam program-program partai dalam setiap periode dan tingkatan kepengurusan. Komitmen dan keseriusan partai politik dalam melakukan kaderisasi harus bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang kongkret dan dipahami oleh publik. Oleh karena itu, setidaknya komitmen dan tingkat keseriusan itu dapat diukur dengan mencermati beberapa indikator sebagai berikut :

- a) Sistem Kaderisasi:
 - 1) Orientasi pengkaderan
 - 2) Kesesuaian materi kaderisasi dengan platform dan program
 - 3) Mekanisme kaderisasi

b) Kelembagaan:

- 1) Keberadaan lembaga kaderisasi dalam tiap tingkatan kepengurusan partai
- 2) Penjaluran kader pasca kaderisasi (penjaluran output)
- 3) Adanya trainer yang melaksanakan kegiatan pengkaderan

c) Kuantitas:

- 1) Jumlah orang yang mengikuti pengkaderan
- 2) Jumlah trainer

d) Kualitas:

- 1) Tingkat kapasitas keahlian peserta kaderisasi
- 2) Karya atau prestasi peserta pasca kaderisasi

e) Waktu dan Dana :

1. Alokasi waktu yang dialokasikan bagi program-program Pengkaderan.
2. Alokasi dana yang dianggarkan untuk program-program Pengkaderan.

2.1. Prinsip Kaderisasi

Prinsip kaderisasi memiliki tiga bentuk yang dapat dibedakan sebagai berikut;

- **Kaderisasi Terbuka**

Prinsip terbuka ini mengandung arti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua partai politik, artinya anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (Training) dan kegiatan- kegiatan yang lainnya dalam proses kaderisasi. Kaderisasi perlu disertai jaminan bahwa semua kader yang telah menjadi anggota politik, caleg dan sayap partai yang memiliki potensi sama penilaian lain

yang ditentukan oleh partai politik yang sifatnya demokratis dapat mengikuti seluruh jenjang kegiatan kaderisasi.

- **Kaderisasi Tertutup**

Prinsip tertutup ini pemberian akses yang berbeda dalam proses kaderisasi juga sekaligus berarti bahwa mekanisme kaderisasi juga membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota untuk mendapatkan promosi dan karier politik melalui kaderisasi politik tanpa membedakan warna kulit, golongan, agama, gender serta suku.

- **Kaderisasi Berjenjang**

Prinsip kaderisasi ini berdasarkan penjenjangan. Partai politik didasarkan pada pelapisan yang bertahap. Bertingkat atau pyramidal. Ini misalnya disusun dengan melakukan penjenjangan kaderisasi tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjutan. Rasionalisasi penjenjangan model hierarki ini bisa dilakukan karena ada penjenjangan sebagai akibat pentahapan materi kaderisasi (Materi bersifat Piramidal) dan penjenjangan sebagai akibat pentahapan akhir dalam organisasi.

Penggunaan model penjenjangan seperti ini menciptakan beberapa implikasi dalam kaitannya dengan kehidupan internal partai. Pertama dilakukan karena ada kebutuhan untuk menyelesaikan pada pembekalan kapasitas lainnya. Intinya, materi pengkaderan diandalkan dalam skema piramidal. Pentahapan materi dalam skema pyramidal akan berguna untuk dapat memastikan bahwa setiap kader partai memiliki tingkat kapasitas yang sama karena melalui proses kaderisasi yang sama (Standarisasi).

Kedua, penjenjangan kaderisasi sebagai akibat dari kebutuhan persyaratan meniti karier organisasi pada posisi ditingkat lokal dengan regional maupun pusat. Ini misalnya tampak dari persyaratan ditingkat kaderisasi yang diikuti oleh calon ketua partai, sekretaris jenderal dan sebagainya di setiap tingkatan.

2.2. Model Kaderisasi

a. Kaderisasi untuk anggota Partai Politik

Pada umumnya partai politik melakukan proses kaderisasi untuk internal kadernya. Pada partai-partai *modern*, anggota partai yang telah terdaftar yang membayar iuran keanggotaan secara teratur dalam jangka waktu tertentu secara otomatis akan mendapatkan *Training* oleh partai politik dengan tujuan tertentu pula. Kaderisasi anggota partai politik di partai yang kelembagaannya politiknya bagus dan dirancang sedemikian rupa untuk mendapatkan keluaran kader sesuai dengan visi dan misi Partai Politik yang bersangkutan. Proses kaderisasi anggota Partai Politik dilakukan secara sistematis, berjenjang dan dalam jangka waktu tertentu secara terus menerus.

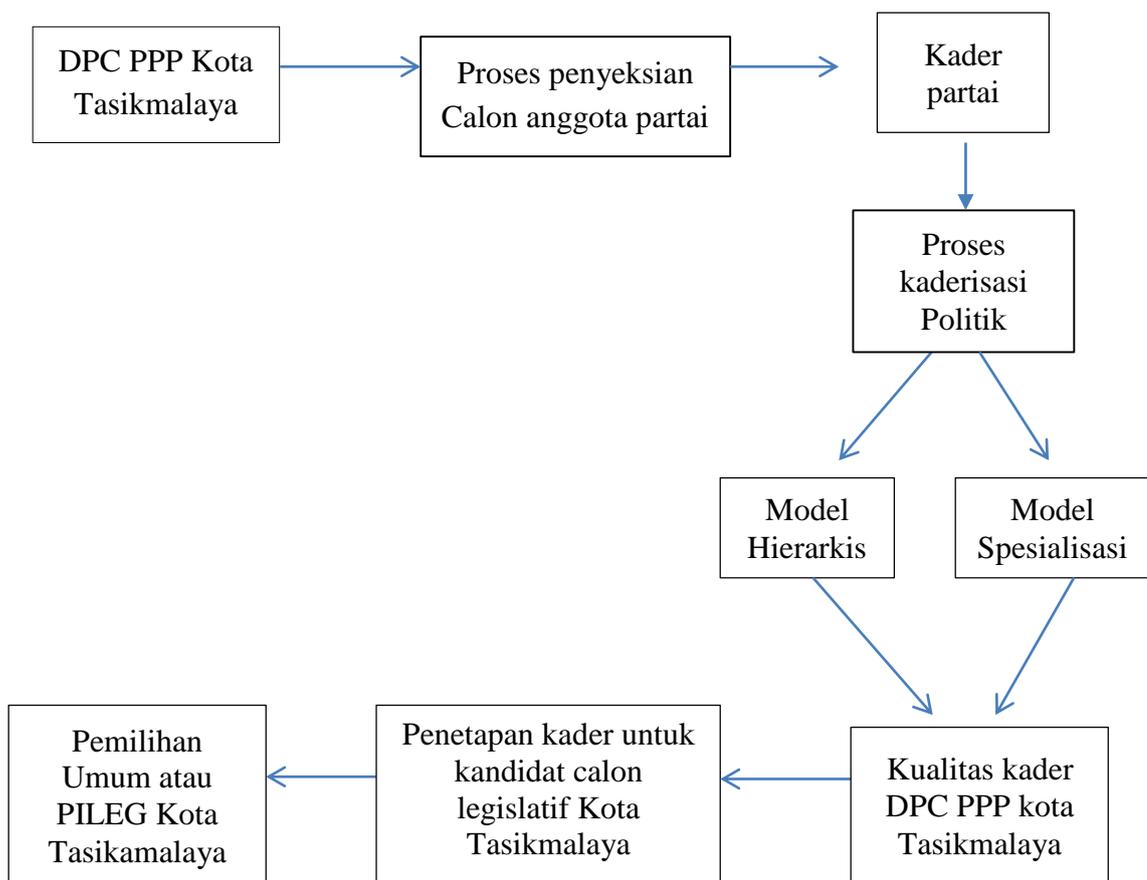
b. Kaderisasi untuk non Anggota Partai Politik

Organisasi sayap partai menjadi sumber penting lainnya dalam kaderisasi partai Politik. Melalui sayap internalisasi ideologis partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat

lainnya. Sebab, organisasi sayap merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sebuah partai politik. Organisasi sayap partai memberikan andil besar bagi partai politik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai. Organisasi sayap partai dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi serta organisasi keagamaan.

3. Kerangka Pikiran

Gambar 2.4
Kerangka Pikiran



Penjelasan bahwa dalam sistem politik terdapat partai politik sebagai organisasi yang dapat menjembatani seseorang dengan kekuasaan. Partai persatuan

pembangunan salah satu Partai Politik yang ada di Indonesia. Dalam sistem partai tersebut terdapat perangkat pendukung yaitu struktur organisasinya. Mulai dari ketua umum hingga para anggota aktif. Salah satunya yang akan dibahas dalam penelitian saya adalah DPC Partai PPP kota Tasikmalaya.

Setiap periode kepengurusan partai pasti mengalami perubahan. Pergantian anggota lama ke anggota baru partai yang haus akan pengalaman, Maka dari itu perlu adanya regenerasi di tubuh partai. Kemudian anggota atau pengurus lama harus membina dan mengajarkan pendidikan kepada para anggota baru di partai melalui serangkaian seleksi untuk bergabung di keluarga besar PPP.

Kemudian calon anggota partai itu diseleksi sedemikian rupa oleh orang partai hingga menjadi seorang kader partai. Setelah menjadi kader partai kemudian dibina dengan pendidikan kader Pengajaran pendidikan kader seperti pengenalan visi dan misi partai, dan berjuang atas nama partai dan kepentingan Negara. Yang merupakan bagian dari proses pengkaderan partai PPP.

Proses pembinaan dan pengkaderan kader partai ada klasifikasi modelnya dilihat dari aspek model hierarki dan model spesialisasi. Model hierarkis yaitu model yang melihat tingkatan kader itu dibina, mulai dari tingkatan dasar, menengah dan lanjutan. Kemudian model spesialisasi yaitu model yang melihat dari keahlian lebih yang dimiliki oleh kader partai. Misalnya kader memiliki keahlian dalam berbicara, aktif berorganisasi dan piawai dalam berkomunikasi dengan orang lain.

Setelah dilihat dari aspek model hierarkis dan spesialisasi, partai dapat mengetahui bagaimana kualitas dan kapasitas kader partainya selama mengikuti

pengkaderan partai. Ada tingkatan dan beberapa keahlian yang membedakan kader satu dengan yang lainnya. Sekian banyak pembinaan dan pengkaderan itu ada Hanya kader yang terbaik lah yang dapat bersaing dengan kader partai lain dalam pemilihan legislatif tahun sekarang.

Penentuan kualitas kader partai PPP sudah ditentukan, kemudian dipilihlah kader kader partai yang berkualitas dan berkompeten untuk membawa kepentingan partai ke masyarakat dengan baik. Kemudian kader tersebut dijadikan calon legilatif partai maupun eksekutif untuk berjuang membawa panji partai PPP di Kota Tasikmalaya dalam pemilihan umum untuk kategori pemilihan Legislatif Kota (DPRD Kota Tasikmalaya) sebagai tujuan akhir dari proses Pengkaderan partai PPP Kota Tasikmalaya.

4. Penelitian Terdahulu

Dalam proses pembuatan pengajuan judul Proposal Skripsi Penulis mencari referensi dan judul-judul Skripsi yang sebelumnya untuk menjadi sumber pengetahuan atau penelitian terdahulu agar tidak adanya kesamaan dalam pembuatan judul Skripsi, tentu saja penulis mencari Judul yang berbeda dengan skripsi atau laporan orang lain.

Kami mengajukan penelitian tentang Analisis Pola dan Proses Pengkaderan dalam Partai Politik. Penelitian ini lebih difokuskan untuk mendidik mencetak kader partai dan Calon Legislatif Partai dan juga melihat sistem pengkaderan partainya sudah berjalan atau tidak. Oleh karena itu kami mencari perbandingan yang Proposal sebelumnya yang menjadi pengetahuan umum dalam membuat laporan

Skripsi tersebut, kami menemukan perbandingan Laporan skripsi sebelumnya, diantaranya adalah :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Pola Kaderisasi Partai Politik (studi Dekriptif : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Periode 2016 : 2021	Vernanda Samuel	2017	Dalam persamaan antara pengajuan Judul Proposal Penulis dengan Skripsi yang dibuat Tri Hendra yaitu meneliti satu partai terutama meneliti pola dan proses kaderisasi dan pengakderan terhadap anggota partai dan calon legislatif partai nya.	Perbedaan dalam penelitian ini hanya pada studi kasus yang terjadi yaitu cakupan penelitian dan partai yang berbeda. Dalam penelitiannya, beliau meneliti Pola kaderisasi PKPI sekala Provinsi sedangkan dalam penelitian ini, saya berfokus di Partai PPP di Kabupaten / Kota.